

**ANALISIS PELAKSANAAN DAN PENGUNGKAPAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL
PERUSAHAAN PERBANKAN DI INDONESIA
(Studi Komparatif Bank Pemerintah dan Bank Swasta)**

**Oleh:
Asmaul Janah**

**Pembimbing:
Dr. Erwin Saraswati, Ak., CPMA., CSRS**

**Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Brawijaya**

ABSTRACT

This study investigates Corporate Social Responsibility implementation and disclosure of Indonesian state banks and private banks to find evidence of differences among them. Corporate Social Responsibility implementation and disclosure are identified based on Global Reporting Initiative (GRI) G3.1 guidelines. The population in this study is 31 Indonesian banks listed in Indonesian Stock Exchange (IDX) in 2011. 20 banks are selected by using nonprobability random sampling. Research method of this study uses mix method research combining quantitative and qualitative approaches. The differences among state banks and private banks are tested using Mann Whitney U and Paired T Test statistic. The result indicates that there are significant differences in total disclosure of Corporate Social Responsibility and in each of the GRI indicators among the state and private banks.

Keyword: *Corporate Social Responsibility, Disclosure, Implementation, Private Bank, and State Bank*

PENDAHULUAN

Perbankan merupakan salah satu tonggak perekonomian di Indonesia, karena bank memiliki peran penting dalam usaha penyaluran dana untuk berbagai kepentingan yang secara langsung berhubungan dengan berbagai komunitas lingkungan masyarakat (Djogo, 2005). Hubungan dengan komunitas ini akan memiliki dampak, bank diharuskan tidak hanya menjalankan tugasnya dalam bidang perbankan, namun wajib memberikan bukti kepedulian terhadap komunitas yang secara langsung berhubungan dengan kegiatan operasinya. Salah satu bentuk kepedulian tersebut adalah program *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Fenomena yang terjadi di Indonesia saat ini, perbankan diklasifikasikan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, salah satunya berdasarkan *major shareholders* yang membagi perbankan menjadi dua macam yaitu bank pemerintah dan bank swasta (Latumaerissa, 2012). Perbedaan *major shareholders* ini berdampak pada timbulnya perbedaan dalam hal pengambilan keputusan dan kepentingan jangka panjang perusahaan, termasuk keputusan pengungkapan dan pelaksanaan CSR (Yamak dan Suer, 2010).

Wibisono (2007) menyatakan bahwa CSR bank tidak hanya dilihat sebagai tanggungjawab, namun memiliki manfaat yang besar bagi kelangsungan organisasi perbankan itu sendiri. CSR dapat memberikan *image* sosial yang positif pada masyarakat yang penting bagi perusahaan dengan visibilitas publik yang tinggi seperti bank (Branco dan Rodrigues, 2006). Hal ini dikarenakan pengungkapan keterlibatan masyarakat terkait dengan cara perusahaan berhubungan dengan masyarakat akan menjadi daya tarik tersendiri untuk diketahui publik, yang ditujukan untuk mendapatkan perhatian masyarakat melalui kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan. Adanya kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan masyarakat tertarik untuk bergabung menjadi bagian dari perusahaan, baik sebagai konsumen maupun investor (Yuniarti, 2007). Hal inilah yang membuat program CSR entitas bank meningkat dari tahun ke tahun.

Menurut penelitian Dye dan Sridhar (2008), terdapat kecenderungan perbedaan pengungkapan informasi perusahaan termasuk CSR berdasarkan kekhasan industri dan *major shareholders*. Perbedaan *stakeholder* dari sebuah entitas bank akan mempengaruhi ekspektasi dan kompensasi yang ingin didapatkan dari perusahaan (Yamak dan Suer, 2010). *Owners* untuk perusahaan swasta memiliki ekspektasi yang lebih terhadap memaksimalkan keuntungan dan kekayaan dari dividen dan *earning per share* yang direpresentasikan dengan *Net Present Value* (NPV) yang positif. *Government* mempunyai kasus tersendiri dan standar dalam melaksanakan kinerja sebagai *stakeholder*, karena terdapat regulasi dan Undang-

Undang. Harapan utama dari keputusan yang diambil bukan semata-mata untuk memaksimalkan keuntungan, namun lebih kepada menjaga stabilitas ekonomi negara. Perbedaan tersebut mengakibatkan perbedaan antara swasta yang menjadi *major shareholder* dan pemerintah yang menjadi *major shareholder* ketika melakukan tindakan dalam perusahaan, termasuk pelaksanaan CSR. Demikian pula untuk perbankan akan mempunyai dampak yang sama.

Selain perbedaan kepentingan *major shareholders*, fenomena lain yang berbeda antara Bank Pemerintah dan Bank Swasta adalah Undang-Undang. Indonesia memiliki Undang-Undang yang mengatur seluruh Perseroan Terbatas termasuk bank, Undang-Undang lain yang bersifat spesifik mengatur tentang CSR perusahaan milik pemerintah (BUMN). Adanya perbedaan penegasan Undang-Undang ini akhirnya menyebabkan perbedaan pelaksanaan CSR pada perusahaan milik swasta dan BUMN, termasuk untuk perusahaan yang bergerak di bidang perbankan.

Pelaksanaan CSR bank swasta Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (PT) dalam pasal 2 yang menyebutkan bahwa Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan, kemudian Undang-Undang ini menjadi pedoman kewajiban PT untuk melaksanakan CSR. Berbeda dengan bank swasta, bank milik pemerintah telah memiliki Undang-Undang lebih terperinci untuk kegiatan CSR, yaitu Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (PKBL). Peraturan ini mengatur lebih detail mengenai pelaksanaan program CSR yang dilakukan oleh BUMN termasuk besaran prosentase yang harus disisihkan dari laba perusahaan untuk kegiatan CSR tersebut. PKBL BUMN dibentuk secara khusus untuk menjalankan salah satu

tujuan negara yaitu mengelola sumberdaya alam dan aset negara yang diperuntukkan demi kepentingan dan kesejahteraan hidup rakyat Indonesia.

Isu mengenai variasi pengungkapan CSR sudah mulai didiskusikan di Amerika Serikat sejak tahun 1960. Akhirnya pada tahun 2000, *Global Reporting Initiative* (GRI) yang merupakan program dari Perserikatan Bangsa-Bangsa membuat pedoman tentang *Sustainability Reporting* yang dapat digunakan perusahaan dalam pengungkapan kegiatan CSR-nya. Program GRI ini dibentuk untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan dan pengungkapan CSR, sehingga dapat diperbandingkan, serta dapat dievaluasi. Pelaksanaan dan pengungkapan kegiatan CSR dituangkan dalam bentuk laporan yaitu *Sustainability Reporting* yang mengikuti *guideline* GRI.

Penelitian ini akan mengkomparasikan pelaksanaan dan pengungkapan CSR antara Bank Pemerintah dan Bank Swasta dengan menggunakan indikator penilaian berdasarkan *Global Reporting Initiative* (GRI). *Guideline* yang digunakan adalah GRI G.3 yang meliputi 6 aspek, yaitu *Environmental, Human Rights, Labor Practices and Decent Work, Society, Product Responsibility*, dan *Economic* (GRI, 2011).

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perbedaan pelaksanaan dan pengungkapan CSR yang dilakukan perbankan Indonesia pada laporan keberlanjutan dan laporan keuangan sesuai *Global Reporting Initiative* (GRI) *guideline*. Kontribusi dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan akuntansi pertanggungjawaban sosial, khususnya pengungkapan CSR pada perbankan di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep dan Teori yang Mendasari Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial

Menurut *National Association of Accountant* (NAA) akuntansi pertanggungjawaban sosial semata-mata tidak untuk menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan kegiatan

sosial dan telah ikut berperan serta dalam masalah sosial, tetapi untuk mengevaluasi *social performance* perusahaan, karena dengan *social performance* masyarakat dapat membentuk *image* positif atau negatif. Menurut Wibisono (2007) terdapat tiga macam tujuan perusahaan dalam menyajikan informasi akuntansi pertanggungjawaban sosial, yaitu untuk mengukur kontribusi sosial bersih perusahaan terhadap lingkungan dan untuk menyediakan secara optimal informasi-informasi yang relevan dengan unsur-unsur sosial dalam tujuan, kebijakan, program, kinerja, dan sumbangan perusahaan terhadap tujuan sosial. Dalam hal ini, akuntansi sosial berperan dan menjalankan fungsinya sebagai bahasa bisnis yang mengakomodasi masalah-masalah sosial yang dihadapi oleh perusahaan.

Stakeholder theory dan *legitimacy theory* merupakan teori yang sering digunakan untuk mendasari penelitian di bidang tanggung jawab sosial perusahaan. Menurut Deegan (2004), teori *stakeholder* erat kaitannya dengan teori *legitimacy*. Keduanya menjelaskan alasan pengungkapan suatu informasi oleh perusahaan dalam laporan keuangan.

Teori Legitimasi berdasar pada pernyataan bahwa terdapat sebuah "kontrak sosial" antara perusahaan dengan lingkungan di mana perusahaan tersebut beroperasi. Kontrak sosial adalah sebuah cara untuk menjelaskan banyaknya ekspektasi yang dimiliki masyarakat mengenai bagaimana seharusnya perusahaan menjalankan operasinya (Deegan, 2004). Jadi, pada dasarnya setiap perusahaan memiliki kontrak implisit dengan *stakeholders*, jika perusahaan memenuhi kontrak implisit dengan *stakeholder*, maka *stakeholder* akan bertindak sebagaimana yang diinginkan perusahaan. Teori *stakeholders* menyatakan bahwa semua *stakeholder* mempunyai hak memperoleh informasi mengenai aktivitas perusahaan yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan mereka. Tujuan utama teori *stakeholder* adalah membantu manajer korporasi mengerti lingkungan *stakeholder* dan melakukan pengelolaan dengan lebih efektif di antara keberadaan hubungan-hubungan di lingkungan perusahaan.

Konsep *Corporate Social Responsibility*

Menurut Wood (2000), ide dasar CSR adalah bisnis dan masyarakat saling terkait dan bukan entitas yang terpisah. Secara lebih umum, terdapat perbedaan antara memperlakukan CSR sebagai sebuah bentuk kedermawanan dengan CSR yang dianggap sebagai bisnis inti (*core business*). Awalnya perusahaan melakukan aktivitas bisnis tanpa menghiraukan lingkungan sosial, namun belakangan perusahaan melakukan operasi bisnis intinya dengan cara bertanggung jawab secara sosial untuk meningkatkan daya saing bisnis dan memaksimalkan nilai kesejahteraan masyarakat.

Sampai saat ini memang tidak ada definisi yang tunggal mengenai CSR, namun dari semua definisi yang ada, dapat disimpulkan CSR merupakan bagian strategi bisnis korporasi yang berkaitan dengan kelangsungan usaha dalam jangka panjang. Selain itu, semua konsep CSR menawarkan sebuah kesamaan, yaitu keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis dan perhatian terhadap aspek sosial, serta lingkungan. CSR mencakup seluruh aktivitas perusahaan dalam berbagai topik sosial dan lingkungan yang biasanya mencakup isu keberagaman, *philanthropy*, *socially responsible investment* (SRI), lingkungan, hak asasi manusia, tempat kerja, etika bisnis, *sustainability*, pengembangan masyarakat dan *corporate governance*.

Perusahaan Sektor Perbankan Indonesia

Menurut UU Perbankan No. 10 tahun 1998, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Di Indonesia, Perbankan adalah salah satu bentuk perusahaan yang memiliki peran strategis untuk memberikan pemberdayaan masyarakat. Bank memiliki visibilitas yang tinggi, karena operasionalnya yang erat dengan kehidupan

sosial masyarakat. Masing-masing negara memiliki karakteristik dan bentuk bank yang berbeda-beda yang disesuaikan dengan kondisi dan keadaan negara tersebut. Di Indonesia sendiri memiliki karakteristik bank yang ditujukan untuk membantu lancarnya peredaran moneter dan menunjang kemajuan masyarakat.

Pelaksanaan CSR bank swasta Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (PT), sedangkan bank pemerintah diatur lebih rinci dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (PKBL). PKBL BUMN dibentuk secara khusus untuk menjalankan salah satu tujuan negara yaitu mengelola sumberdaya alam dan aset negara yang diperuntukkan demi kepentingan dan kesejahteraan hidup rakyat Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *mixed methods research*, yang merupakan suatu desain penelitian yang didasari asumsi filosofis sebagaimana metode inkuiri. *Mixed Methods Research* disebut sebagai sebuah metodologi yang memberikan asumsi filosofis dalam menunjukkan arah atau memberi petunjuk cara pengumpulan data dan menganalisis data, serta perpaduan pendekatan kuantitatif dan kualitatif melalui beberapa fase proses penelitian (Creswell dan Clark, 2011).

Populasi dan Penentuan Sampel

Populasi yang menjadi objek dalam penelitian ini meliputi seluruh bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2011 berdasarkan *Indonesian Capital Market Directory* (ICMD), yaitu sebanyak 31 bank. Penentuan sampel dilakukan secara nonrandom (*nonprobability sampling*) dengan metode *purposive sampling* yang dilakukan dengan

mengambil sampel dari populasi berdasarkan suatu kriteria tertentu (Jogiyanto, 2004). Sampel yang sesuai dengan kriteria adalah sebanyak 20 bank. Prosedur pemilihan sampel dapat dilihat pada tabel 1.

Metode Analisis Data

Analisis data yang pertama adalah analisis kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan data dokumenter untuk analisis kualitatif, sehingga metode yang digunakan adalah metode *content analysis* dengan menelusuri *annual report* dan *sustainability report* perusahaan sampel. Berdasarkan hasil penelusuran akan dipetakan pengungkapan sosial yang telah dilakukan perusahaan dengan *instrument* penelitian. Hasil penelitian ini diinterpretasikan secara deskriptif. Analisis laporan tahunan dan *sustainability report* perusahaan menggunakan indikator pengungkapan CSR berdasarkan *guideline* GRI yang terdiri dari enam indikator utama yaitu *Environmental, Human Rights, Labor Practices and Decent Work, Society, Product Responsibility*, dan *Economic*.

Analisis statistik dilakukan untuk mengetahui tingkat kecenderungan perbedaan dari pengungkapan CSR perbankan swasta dan pemerintah, dalam penelitian ini dilakukan dengan metode uji dua rata-rata non parametrik *Mann-Whitney U Test*.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis Kualitatif Deskriptif

Berdasarkan *content analysis* indikator GRI, diperoleh tabel hasil *coding* yang menunjukkan penilaian peneliti terhadap masing-masing indikator pada perusahaan sampel beserta nilainya (lampiran tabel 3). Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa indikator CSR GRI G3.1 yang paling banyak diungkapkan adalah *economic performance indikator* yang menggambarkan kinerja ekonomi perusahaan, nilai ekonomi langsung yang dihasilkan

dan didistribusikan oleh perusahaan (termasuk pendapatan, biaya operasi dan lain sebagainya), *market presence*, dan dampak ekonomi tidak langsung sebanyak 340 poin atau sebesar 41,3%. Selain itu, hasil *coding* menunjukkan bahwa seluruh bank sampel mengungkapkan *economic performance indikator* paling banyak dibandingkan dengan indikator lainnya. Hal ini sejalan dengan penelitian Nurkhin (2012) yang menemukan bahwa kelompok perusahaan perbankan, manufaktur, dan telekomunikasi adalah kelompok perusahaan yang paling banyak mengungkapkan kegiatan CSR untuk indikator *economic performance GRI*. Paramita (2008) menemukan bahwa perusahaan *finance* termasuk bank memenuhi pengungkapan indikator *economic performance* paling banyak dibandingkan dengan indikator lainnya. Hal ini disebabkan oleh komponen kinerja ekonomi adalah suatu kewajiban yang mutlak untuk diungkapkan perusahaan karena dapat menunjukkan nilai perusahaan (*corporate value*) yang penting untuk penilaian investor maupun *stakeholders* lainnya.

Indikator berikutnya yang banyak diungkapkan oleh bank sampel adalah *Product Responsibility Performance Indicator* sebanyak 208 poin (25,2%), *Labor Practices & Decent Work Indicator* sebesar 148 (18%), kemudian *Environment Performance Indikator* sebanyak 70 poin (8,5%), *Society Performance Indicator* sebanyak 51 poin (6,2%), dan indikator terakhir dengan poin pengungkapan paling kecil adalah *Human Rights Performance Indicator* sebanyak 7 poin (0,8%). Kecilnya pengungkapan indikator *Human Rights* tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan belum banyak melakukan atau mengungkapkan kegiatan dan tindakan perusahaan yang secara khusus berkaitan dengan masalah hak asasi manusia. Adapun yang mengungkapkan indikator ini, rata-rata hanya menyebutkan tentang kesetaraan *gender*, sehingga poin yang didapatkan juga hanya sedikit. Hal ini juga ditemukan oleh penelitian Paramita (2008) bahwa *Human Rights Performance Indicator* merupakan indikator terkecil yang diungkapkan perusahaan dikarenakan terdapat perbedaan tindakan hak asasi

manusia antara perusahaan dengan yang dimaksudkan dalam indikator *Human Rights G3.1 GRI*.

Analisis Statistik Deskriptif

Hasil analisis statistik deskriptif pada masing-masing indikator GRI yang dianalisis, semakin besar nilainya, artinya perusahaan tersebut semakin banyak mengungkapkan CSR dalam *annual report* maupun *sustainability report*. Selain itu, standar deviasi yang lebih kecil dari nilai rata-rata menunjukkan bahwa indikator pengungkapan mempunyai variasi yang kecil antar perusahaan sampel. *Economic performance indicator*, *Labor Practices & Decent Work Indicator*, dan *Product Responsibility Performance Indicator* memiliki standar deviasi yang lebih kecil dari pada nilai rata-rata, hal ini menunjukkan rentang pengungkapan ketiga indikator ini untuk masing-masing bank adalah rendah. Hasil analisis statistik deskriptif dapat dilihat pada lampiran tabel 4.

Analisis Statistik Analitik dan Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil pengujian statistik menggunakan *Independent t test* dan *Mann Whitney U Test* dengan menggunakan alat bantu SPSS 18.0 yang telah dijabarkan di atas, berikut akan dilakukan pembahasan terkait dengan perumusan preposisi yang telah diajukan. Pertama, hasil *coding* menunjukkan rata-rata hasil pengungkapan CSR antara bank pemerintah dan bank swasta (hasil uji statistik dapat dilihat pada tabel 5 dan tabel 6).

Hasil dari rata-rata *coding* didukung oleh hasil uji statistik menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan pelaksanaan dan pengungkapan CSR antara bank pemerintah dan bank swasta untuk total keseluruhan, maupun untuk tiap indikator. Hal ini dikarenakan bank pemerintah yang diwajibkan untuk melaksanakan Program Kemitraan dan Bakti Lingkungan (PKBL) sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. Per-

05/MBU/2007, menimbulkan luasnya pengungkapan CSR dalam indikator *Environment Performance Indicator* dan *Society Performance Indicator*. Selain itu, bank pemerintah kini sedang berlomba untuk menjadi *icon* perbankan yang berbasis kerakyatan karena PKBL BUMN dibentuk secara khusus untuk menjalankan salah satu tujuan negara yaitu mengelola sumberdaya alam dan aset negara yang diperuntukkan demi kepentingan dan kesejahteraan hidup rakyat Indonesia. Oleh karena itu, dengan tujuan merangkul masyarakat Indonesia secara luas membuat bank pemerintah melaksanakan CSR lebih banyak.

Kementerian Negara BUMN melalui Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (PKBL) menjabarkan peran dan partisipasi BUMN kedalam 2 program, yakni : Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan. Pasal 2 ayat (1) Permeneg BUMN tersebut menegaskan bahwa Persero dan Perum wajib melaksanakan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini. Sumedi (2010) melakukan penelitian terhadap pengaruh regulasi pemerintah terhadap pengungkapan CSR, menggunakan data dari *annual report*, hasilnya menunjukkan bahwa regulasi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR di Indonesia. Oleh karena itu, Undang-Undang BUMN yang mewajibkan PKBL menjadi faktor yang mendukung BUMN melaporkan CSR lebih banyak daripada bank swasta terutama dalam bidang *Environment Performance Indicator* dan *Society Performance Indicator*.

Selain kedua indikator tersebut di atas, untuk mencapai tujuan sebagai lembaga pengelola aset negara untuk kesejahteraan rakyat sesuai Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. Per-05/MBU/2007, BUMN akan melaksanakan jaminan atas profesi bagi setiap karyawannya. Hal ini disebabkan seluruh karyawan BUMN merupakan bagian dari masyarakat Indonesia. Melalui pemberdayaan dan upaya peningkatan kesejahteraan

karyawan, BUMN berusaha untuk mencapai tujuan yang diamanatkan oleh negara tersebut. Hal ini mengakibatkan tingginya pengungkapan CSR Bank BUMN untuk *Labour Practice and Decent Work*.

Beberapa penelitian sebelumnya menyatakan bahwa bank pemerintah memiliki tingkat inefisiensi yang tinggi dalam hal kinerja. Penelitian Bonin et. Al (2003) di negara-negara yang sedang mengalami transisi menyebutkan bahwa bank yang dimiliki oleh pemerintah kurang efisien dibandingkan dengan bank yang dimiliki oleh swasta ataupun asing. Di Indonesia, Jasmina dan Goeltom (2005) juga menyimpulkan bahwa bank pemerintah memiliki tingkat inefisiensi teknis yang lebih besar dari bank swasta. Hal tersebut menyebabkan bank pemerintah akan melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja serta CSR dalam rangka memperoleh kepercayaan yang lebih besar dari *stakeholders*. Peningkatan kinerja salah satunya dapat dilihat melalui pengungkapan *economic performance indicator*, hal ini disebabkan oleh komponen kinerja ekonomi adalah suatu kewajiban yang mutlak untuk diungkapkan perusahaan karena dapat menunjukkan nilai perusahaan (*corporate value*) yang penting untuk penilaian investor maupun *stakeholders* lainnya. Oleh karena BUMN berusaha untuk memperlihatkan peningkatan kinerja, maka BUMN dapat melakukan cara-cara yang salah satunya adalah mengungkapkan *economic performance indicator* secara rinci.

Upaya untuk memenuhi harapan para pemangku kepentingan dan juga untuk memperoleh legitimasi masyarakat, BUMN melalui *Product Responsibility Performance Indicator* berusaha untuk membangun keyakinan dari masyarakat dan *stakeholders* bahwa BUMN merupakan lembaga yang dapat dipercaya. Hal ini dilakukan untuk membuktikan bahwa sebagai bank milik pemerintah dengan tingkat inefisiensi tinggi, BUMN mampu memberikan pelayanan produk dan jasa dengan kualitas yang lebih baik daripada bank swasta.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Dye and Sridhar (2008) yang menyatakan bahwa terdapat kecenderungan perbedaan pengungkapan informasi perusahaan termasuk CSR berdasarkan kekhasan industri dan *major shareholders*. Yamak dan Süer (2010) mendukung pendapat tersebut dengan mengungkapkan bahwa perbedaan *stakeholder* dari sebuah entitas bank akan mempengaruhi ekspektasi dan kompensasi yang ingin didapatkan dari perusahaan. *Government* mempunyai standar dalam melaksanakan kinerja sebagai *stakeholder*, yaitu regulasi dan Undang-Undang. Harapan utama dari keputusan yang diambil bukan semata-mata untuk memaksimalkan keuntungan, namun lebih kepada menjaga stabilitas ekonomi negara. Hal ini mengakibatkan perbedaan antara swasta yang menjadi *major shareholder* dan pemerintah yang menjadi *major shareholder* ketika melakukan *action* dalam perusahaan, termasuk pelaksanaan CSR. Apabila diaplikasikan terhadap perbankan Indonesia yang memiliki *major shareholders* berbeda, akan menyebabkan perbedaan pengambilan keputusan strategis perusahaan, termasuk keputusan pelaksanaan dan pengungkapan CSR.

PENUTUP

Kesimpulan

Bentuk timbal balik dari organisasi entitas kepada lingkungan sosial dapat dituangkan dalam pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Perspektif ini berlaku pula untuk bank, yang merupakan bentuk dari organisasi. Namun, di Indonesia terdapat dua bentuk bank yang sangat dominan berdasarkan klasifikasi *major shareholders*, yaitu bank swasta dan bank pemerintah. Keduanya memiliki perbedaan, kecenderungan perbedaan pengungkapan informasi perusahaan termasuk CSR berdasarkan kekhasan industri dan *major shareholders* dan Undang-Undang yang mengatur pelaksanaan keduanya. Perbedaan *stakeholder* dari sebuah entitas bank akan mempengaruhi ekspektasi dan kompensasi yang ingin didapatkan

dari perusahaan, swasta lebih berekspektasi pada penambahan laba, sedangkan pemerintah berekspektasi untuk menjaga stabilitas ekonomi Negara dan mensejahterakan rakyat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata *coding content analysis* didukung oleh hasil uji statistik *Mann Whitney U Test* dan *Paired t test*, dalam arti terdapat perbedaan yang signifikan pelaksanaan dan pengungkapan CSR antara bank pemerintah dan bank swasta. Perbedaan ini terjadi untuk keseluruhan total pengungkapan maupun untuk masing-masing dari enam indikator GRI G3.1.

Keterbatasan dan Saran

Keterbatasan dalam penelitian ini, periode pengamatan hanya satu tahun, sehingga hasil penelitian ini hanya menggambarkan kondisi pada tahun 2011; dan *content analysis* dengan melakukan *coding* terhadap masing-masing aspek indikator GRI G3.1 dilakukan dengan justifikasi subjektif yang tinggi, dikarenakan tidak adanya pedoman.

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menciptakan sistem bagi peneliti untuk memahami dan menginterpretasikan atas setiap poin dalam indikator GRI secara seragam untuk melakukan *coding*, sehingga tidak terjadi bias dan alpa dalam menilai satu bank dengan bank yang lainnya.

LAMPIRAN

Tabel 1
Prosedur Pemilihan Sampel

Total Populasi		31
Kriteria Penentuan Sampel		
<i>Annual report</i> tidak dapat diakses melalui <i>website</i> BEI maupun <i>website</i> resmi perusahaan, serta tidak menerbitkan <i>sustainability report</i>	6	
<i>Annual report</i> tidak mengandung laporan CSR dan tidak menerbitkan <i>sustainability report</i>	5	
Jumlah bank yang tidak memenuhi kriteria sampel		(11)
Total Sampel		20

Tabel 2
Data Perusahaan Sampel

NO	NAMA BANK	KODE SAHAM	STATUS
1	PT Bank Artha Graha International Tbk	INPC	Swasta
2	PT Bank Bukopin Tbk	BBKP	Swasta
3	PT Bank Central Asia Tbk	BBCA	Swasta
4	PT Bank CIMB Niaga Tbk	BNGA	Swasta
5	PT Bank Danamon Tbk	BDMN	Swasta
6	PT Bank International Indonesia Tbk	BNII	Swasta
7	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	BMRI	BUMN
8	PT Bank Mega Tbk	MEGA	Swasta
9	PT Bank Mutiara Tbk	BCIC	Swasta
10	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	BBNI	BUMN
11	PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk	BBNP	Swasta
12	PT Bank OCBC NISP Tbk	NISP	Swasta
13	PT Bank of India Indonesia Tbk	BSDW	Swasta
14	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	BJBR	Swasta

15	PT Bank QNB Kesawan Tbk	BKSW	Swasta
16	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	BBRI	BUMN
17	PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	AGRO	Swasta
18	PT Bank Sinarmas Tbk	BSIM	Swasta
19	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	BBTN	BUMN
20	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	BTPN	Swasta

Tabel 3
Hasil Tabulasi Pemenuhan Indikator GRI G3.1

NAMA PERUSAHAAN	EC	EN	LA	HR	SO	PR	Σ
BANK PEMERINTAH							
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	62	12	11	2	14	23	124
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	29	15	16	0	4	21	85
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	34	11	12	2	8	25	92
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	11	5	11	0	4	10	41
Σ UNTUK BANK BUMN	136	43	50	4	30	79	342
RATA-RATA	34	10,8	12,5	1	7,5	19,8	85,5
BANK SWASTA							
PT Bank Artha Graha International Tbk	12	0	3	0	0	7	22
PT Bank Bukopin Tbk	9	1	5	0	0	5	20
PT Bank Central Asia Tbk	25	4	7	0	1	14	51
PT Bank CIMB Niaga Tbk	20	9	12	3	2	12	58
PT Bank Danamon Tbk	14	7	9	0	9	8	47
PT Bank International Indonesia Tbk	17	3	14	0	5	5	44
PT Bank Mega Tbk	12	0	5	0	0	12	29
PT Bank Mutiara Tbk	19	1	3	0	1	9	33
PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk	13	0	6	0	0	6	25
PT Bank OCBC NISP Tbk	11	1	8	0	1	9	30
PT Bank of India Indonesia Tbk	5	0	3	0	0	8	16
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	7	0	3	0	0	6	16
PT Bank QNB Kesawan Tbk	8	0	3	0	0	5	16
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	9	0	8	0	0	9	26
PT Bank Sinarmas Tbk	12	1	5	0	1	8	27
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	11	0	4	0	1	6	22
Σ UNTUK BANK SWASTA	204	27	98	3	21	129	482

RATA-RATA	12,8	1,7	6,1	0,2	1,3	8,1	30,2
Σ KESELURUHAN	340	70	148	7	51	208	824
Prosentase (dalam %)	41,3	8,5	18	0,8	6,2	25,2	100

Keterangan Tabel:

EC: *Economic Performance Indicator*

EN: *Environment Performance Indicator*

LA: *Labor Practices and Decent Work Performance Indicator*

SC: *Society Performance Indicator*

HR: *Human Rights Performance Indicator*

PR: *Product Responsibility Performance Indicator*

Tabel 4
Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Economic	20	5	62	17,00	12,970
Environment	20	0	15	3,50	4,752
Labour	20	3	16	7,40	4,083
Human Right	20	0	3	,35	,875
Society	20	0	14	2,55	3,818
Product	20	5	25	10,40	5,995
Total CSR	20	16	124	41,20	28,931

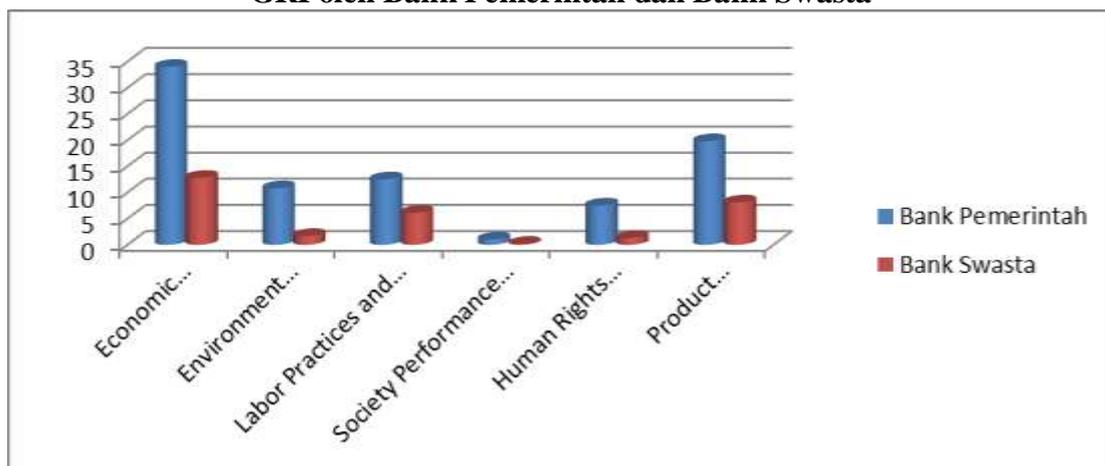
Tabel 5 Hasil Output Independent T Test Perbandingan Pengungkapan CSR Bank Pemerintah dan Bank Swasta

NO	VARIABEL	Sig. (2-tailed)	Nilai rata-rata	Nilai t	HASIL PERBANDINGAN
1	<i>Economic Performance Indikator</i>	0,001	21.250	3.854	Berbeda signifikan
2	<i>Environment Performance Indikator</i>	0,000	9.063	5.335	Berbeda signifikan
3	<i>Labour and Decent Work Indikator</i>	0,002	6.375	3.540	Berbeda signifikan
4	<i>Product Responsibility Indikator</i>	0,037	11.688	3.418	Berbeda signifikan
5	Total CSR	0,000	55.375	5.385	Berbeda signifikan

Tabel 6 Hasil *Output Mann Whitney U Test* Perbandingan Pengungkapan CSR Bank Pemerintah dan Bank Swasta

NO	VARIABEL	NILAI PROBABILITAS	HASIL PERBANDINGAN
1	<i>Society Performance Indicator</i>	0,008	Berbeda signifikan
2	<i>Labor Practices & Decent Work Indicator</i>	0,011	Berbeda signifikan

Grafik 1 Perbandingan Rata-Rata Pengungkapan Masing-Masing Indikator G3.1 GRI oleh Bank Pemerintah dan Bank Swasta



DAFTAR PUSTAKA

- Abu-Baker, N. and Naser, K. 2000. Empirical evidence on corporate social disclosure (CSD) practices in Jordan, *International Journal of Commerce and Management*, Vol. 10 Nos 3/4, pp. 18-34.
- Aria, Arief. 2009. *The Power Of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi*. Salemba Empat: Jakarta.
- Branco, M.C. and Rodrigues, L.L. 2006. Communication of corporate social responsibility by Portuguese banks; a legitimacy theory perspective. *Corporate Communications: An International Journal*. Vol 11 No. 3. pp. 232-248.
- Dechow, Sloan, dan Sweeney. 1995. Detecting Earnings Management. *The Accounting Review* Vol. 70, No. 2 April 1995, pp. 193-225.

- Deegan, C. 2004. The Legitimising Effect of Social and Environmental Disclosure – A Theoretical Foundation. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, Vol. 15, No. 3
- Deegan, C. 2004. *“Financial Accounting Theory”*. MCgRAW-Hill Australia Pty Limited: Australia.
- Deegan, Craig. 2002. The Legitimising Effect of Social and Environmental Disclosures – a Theoretical Foundation. *Accounting, Auditing, and Accountability Journal* Vol. 15 No.3, pp.282-311.
- Djogo, T. 2005. *“Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility)”*. <http://www.beritabumi.com>. Diakses 5 November 2012.
- Douglas, A., Doris, J., and Johnson, B. 2004. Corporate social reporting in Irish financial institutions, *The TQM Magazine*, Vol. 16 No. 6, pp. 387-95.
- Dye, R.A. dan S. Sridhar. 2008. Industry-wide disclosure dynamics, *Journal of Accounting Research* 33, 157–174
- Eisehardt, Kathleen. 2002. Agency Theory: An Assesment and Review, *The Academy of Management Review*, Vol. 14, No. 01. (Jan., 2002), pp. 57-74.
- Frankental, P. 2001. Corporate social responsibility – a PR invention?, *Corporate Communication, An International Journal*, Vol. 6 No. 1, pp. 18-23.
- Gaffikin, M. 2008. *“Accounting Theory: Research, Regulation and Accounting Practice”*. Pearson Education: Australia.
- Ghozali, Imam. 2005. *“Aplikasi analisis multivariate Dengan Program SPSS”*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Hackston, D. dan Milne, J. M. 1996. Some determinants of social and environmental disclosure in New Zealand companies, *Accounting, Auditing and Accountability Journal* Vol. 18, No. 1, pp. 77-108.
- Hamid, F.Z.A. 2004. Corporate social disclosure by banks and finance companies: Malaysian evidence, *Corporate Ownership and Control*, Vol. 1 No. 4, pp. 118-30.
- Hayati, Diana. 2011. Pattern of corporate social responsibility programs: a case study, *Social Responsibility Journal*, Vol. 7 Iss: 1 pp. 104 – 117.
- Healy, Paul M dan Khrisna G Palepu. 2001. Information asymetry, corporate disclosure, and the capital markets: A review of the empirical disclosure literature. *Journal of Accounting and Economics*: 31.

- Hermana, Budi. 2008. “Kepercayaan dan Keberpihakan pada Kepentingan Masyarakat: Muara Akhir dari Integritas Perbankan Nasional?”. Artikel Ilmiah. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Hinson, Robert. 2010. Corporate social responsibility activity reportage on bank websites in Ghana. *International Journal of Bank Marketing*, Vol. 28 Iss: 7 pp. 498 – 518.
- <http://www.bi.go.id/>. “Apa dan Mengapa Program Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia”. Diakses tanggal 15 Oktober 2012.
- <https://www.globalreporting.org/> “Global Reporting Initiative Guideline”. Diakses tanggal 28 November 2012.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2009. “Standar Akuntansi Keuangan”. Buku Satu, Salemba Empat: Jakarta.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 1998. “Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen”. Edisi Pertama, BPFE: Yogyakarta.
- Jamali, D. 2006. Insight into triple bottom line integration from a learning organization perspective. *Business Process Management Journal*, Vol. 12 No. 6, pp. 809-21.
- Jones, P. dan Comfort, D. 2005. Corporate social responsibility and the UK’s top ten retailers. *International Journal of Retail Distribution Management*, Vol. 33 No. 12, pp. 882-892.
- Keputusan Ketua BAPEPAM No: Kep-40/PM/2003.
- Kiroyan. 2006. Karakteristik perusahaan dan pengungkapan tanggung jawab social: study empiris pada perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Jakarta. *Jurnal Seminar Nasional Akuntansi*, VIII Solo, pp. 379-395.
- Kostyuk. 2011. Corporate Social Responsibility In Banks: An International Overview. *Emerald’s The International Journal of Accounting*.
- Latumaerissa, Julius. 2012. “Bank dan Lembaga Keuangan Lain”. Salemba Empat: Jakarta.
- Nuraini, Icha. 2012. *Analisis Pelaksanaan dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility pada Perusahaan Pertambangan Umum di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2010*. Artikel Ilmiah. Universitas Brawijaya, Malang.
- Nurkhin, Ahmad. 2009. “Corporate Governance dan Profitabilitas: Pengaruhnya terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia)”. Tesis. Pasca Sarjana Program Studi Magister Akuntansi, Universitas Diponegoro. www.eprints.undip.ac.id. Diakses tanggal 09 Januari 2012.

- O'Donovan, Garry. 2002. Environmental Disclosure in The Annual Report: Extending The Applicability and Predictive Power of Legitimacy Theory. *Accounting, Auditing, and Accountability Journal*, Vol. 15, No. 3, pp. 344-371.
- Parker, Lee D, Kenneth R. Ferrish dan David T. Otley. 1993. *"Accounting for the Human Factor"*. Prentice Hall Pty Ltd: Australia.
- Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara
- Scott, W.R. 2009. *"Financial Accounting Theory"*. Prentice-Hall: Toronto, Canada.
- Sitepu, Andre Christian. 2008. *"Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Informasi Sosial dalam Laporan Tahunan pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia"*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara, Sumatera.
- Sugiyono. 2001. *"Metode Penelitian Bisnis"*. CV Alfabeta: Bandung.
- Suwardjono. 2010. *"Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan"*. BPF: Jogjakarta.
- Tarna, K. 2009. Reporting on the environment: current practice in the financial services sector, *Greener Management International*, Vol. 26, pp. 49-64.
- The World Bank Group. 2012. *"Corporate Social Responsibility"*, akses web: www.worldbank.org/developmentcommunications/where1/environment/csr.htm. Diakses tanggal 29 November 2012.
- Thompson, P. and Cowton, C.J. 2004. Bringing the environment into bank lending: implications for environmental reporting, *The British Accounting Review*, Vol. 36, pp. 197-218.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
- Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007
- Wibisono, Y. 2007. *"Membedah Konsep dan Aplikasi CSR"*. Fascho Publishing: Gresik.
- Wood, D.J. 1991. Corporate social performance revisited, *Academy of Management Review*, Vol. 16, pp. 691-718.

- Yamak, Sibel. 2010. State as a stakeholder, *Corporate Governance, Emerald International Journal Publishing*, Vol. 5 Iss: 2 pp. 111 – 120
- Yuniarti, Ety. 2007. “*Analisis Pengungkapan Informasi Tanggung Jawab Sosial pada Sektor Perbankan di Indonesia*”. Artikel Ilmiah. Universitas Negeri Diponegoro, Semarang.
- Ze’ghal, D. and Ahmed, S.A. 2002. Comparison of social responsibility information disclosure media used by Canadian firms, *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, Vol. 3 No. 1, pp. 38-53